

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.01.2.692012/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 06
Tanggal : 10 Februari 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
- 3. Provinsi : (09) RIAU
- 4. Kode/Nama Satker : (692012) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
- Sebesar : Rp. 14.370.384.000 (EMPAT BELAS MILIAR TIGA RATUS TUJUH PULUH JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.01.WA Program Dukungan Manajemen
- 135.01.WA. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Jumlah Uang

Rp. 14.370.384.000
Rp. 14.370.384.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 14.370.384.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 14.370.384.000

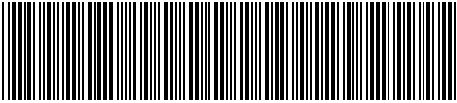
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692012/2026
I A. INFORMASI KINERJA



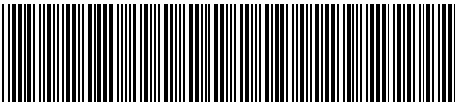
DS:1743-9000-0414-8781

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (692012) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

Halaman : I A. 1

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen				14.370.384.000	
Kegiatan	:	7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum				14.370.384.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		6,00	Layanan, Perkara	11.125.117.000
Rincian Output	:	01	EBA.001	Layanan Komunikasi Publik Bidang Hukum di Wilayah		1.00	Layanan	114.400.000
		02	EBA.959	Layanan Protokoler		1.00	Layanan	133.185.000
		03	EBA.962	Layanan Umum		1.00	Layanan	126.705.000
		04	EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	10.742.841.000
		05	EBA.Z03	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1.00	Layanan	5.580.000
		06	EBA.Z07	Layanan BMN		1.00	Layanan	2.406.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		24,00	Unit, m2, Paket	3.094.870.000
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal		21.00	Unit	842.676.000
		02	EBB.971	Layanan Prasarana Internal		3.00	Unit	2.252.194.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		93,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	96.976.000
Rincian Output	:	01	EBC.Z10	Layanan Manajemen SDM		93.00	Orang	96.976.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		7,00	Layanan, Rekomendasi	53.421.000
Rincian Output	:	01	EBD.001	Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Kinerja dan Penerimaan ASN Kantor Wilayah		1.00	Layanan	36.307.000
		02	EBD.Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		2.00	Rekomendasi	2.911.000
		03	EBD.Z27	Layanan Manajemen Keuangan		1.00	Layanan	8.362.000
		04	EBD.Z32	Layanan Reformasi Kinerja		1.00	Layanan	1.510.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692012/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:1743-9000-0414-8781

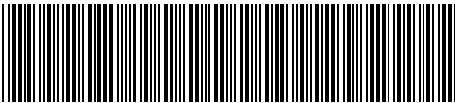
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (692012) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

Layanan Manajemen Kinerja Internal			Layanan, Rekomendasi		
05	EBD.Z34	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Layanan	1.420.000
06	EBD.Z36	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	1.00	Layanan	2.911.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692012/2026
I B. SUMBER DANA



DS:1743-9000-0414-8781

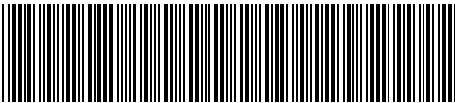
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (692012) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

				Pagu		Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	14.370.384.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	14.370.384.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		(dalam ribuan rupiah)

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692012/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN

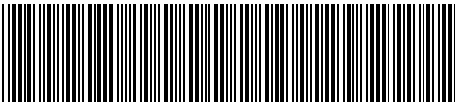


DS:1743-9000-0414-8781

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (692012) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692012	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU	7.018.047	4.257.467	3.094.870	-	-	14.370.384	09 . 00	
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	7.018.047	4.257.467	3.094.870	-	-	14.370.384		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	7.018.047	4.257.467	3.094.870	-	-	14.370.384		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (09.00 RIAU / RIAU)	7.018.047	4.107.070	-	-	-	11.125.117		
01	RM	7.018.047	4.107.070	-	-	-	11.125.117		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (09.00 RIAU / RIAU)	-	-	3.094.870	-	-	3.094.870		
01	RM	-	-	3.094.870	-	-	3.094.870		
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (09.00 RIAU / RIAU)	-	96.976	-	-	-	96.976		
01	RM	-	96.976	-	-	-	96.976		
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (09.00 RIAU / RIAU)	-	53.421	-	-	-	53.421		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692012/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1743-9000-0414-8781

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (692012) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
Kewenangan : (KD)

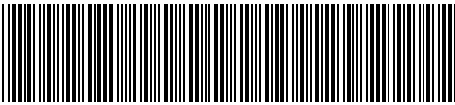
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	53.421	-	-	-	53.421	008	
JUMLAH		7.018.047	4.257.467	3.094.870	-	-	14.370.384		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692012/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:1743-9000-0414-8781

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (692012) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

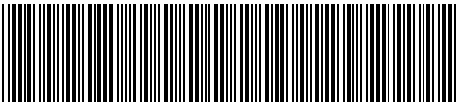
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692012	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	570.140	1.799.246	1.720.529	1.149.809	822.901	1.052.585	1.048.966	1.048.143	1.048.194	1.036.619	1.036.118	2.037.134	14.370.384
		BELANJA PEGAWAI	427.007	485.989	906.499	591.991	583.045	583.045	583.045	583.045	583.045	583.045	583.045	525.246	7.018.047
		BELANJA BARANG	143.133	805.006	469.605	370.139	52.177	281.861	278.242	277.419	277.470	265.895	265.394	771.126	4.257.467
		BELANJA MODAL	0	508.251	344.425	187.679	187.679	187.679	187.679	187.679	187.679	187.679	187.679	740.762	3.094.870
		Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	570.140	1.799.246	1.720.529	1.149.809	822.901	1.052.585	1.048.966	1.048.143	1.048.194	1.036.619	1.036.118	2.037.134	14.370.384
		51 BELANJA PEGAWAI	427.007	485.989	906.499	591.991	583.045	583.045	583.045	583.045	583.045	583.045	583.045	525.246	7.018.047
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	143.133	805.006	469.605	370.139	52.177	281.861	278.242	277.419	277.470	265.895	265.394	771.126	4.257.467
		53 BELANJA MODAL	0	508.251	344.425	187.679	187.679	187.679	187.679	187.679	187.679	187.679	187.679	740.762	3.094.870

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692012/2026
IV A. B L O K I R



DS:1743-9000-0414-8781

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [692012] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

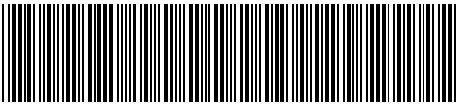
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692012/2026
IV B. C A T A T A N



DS:1743-9000-0414-8781

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [692012] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692012	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU		
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 2.252.194		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		
	* Revitalisasi Listrik Gedung Kantor KIB 1 (1596M2), Revitalisasi Listrik Gedung Kantor KIB 9 (250M2), Penambahan Daya (1 paket) Rp. 2.252.194.000 Rp. 2.252.194		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA